



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Peraturan Presiden No 2/2015



Dialog Rektor dengan DPRD Kabupaten Banjar-Kalsel
Ibis Mangga Dua Hotel-Jakarta, 27 Mei 2016



DADANG SOLIHIN

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 27 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>

Materi

- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional -UU25/2004 tentang SPPN
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional -UU17/2007 tentang RPJPN
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional -Peraturan Presiden No 2/2015
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN
→Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan
- Multilateral Meeting





Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU25/2004 tentang SPPN



UU25/2004 tentang SPPN

SPPN adalah

- ❑ Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
- ❑ Untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
- ❑ Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.



Proses Perencanaan Pembangunan Nasional



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penMalutan Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

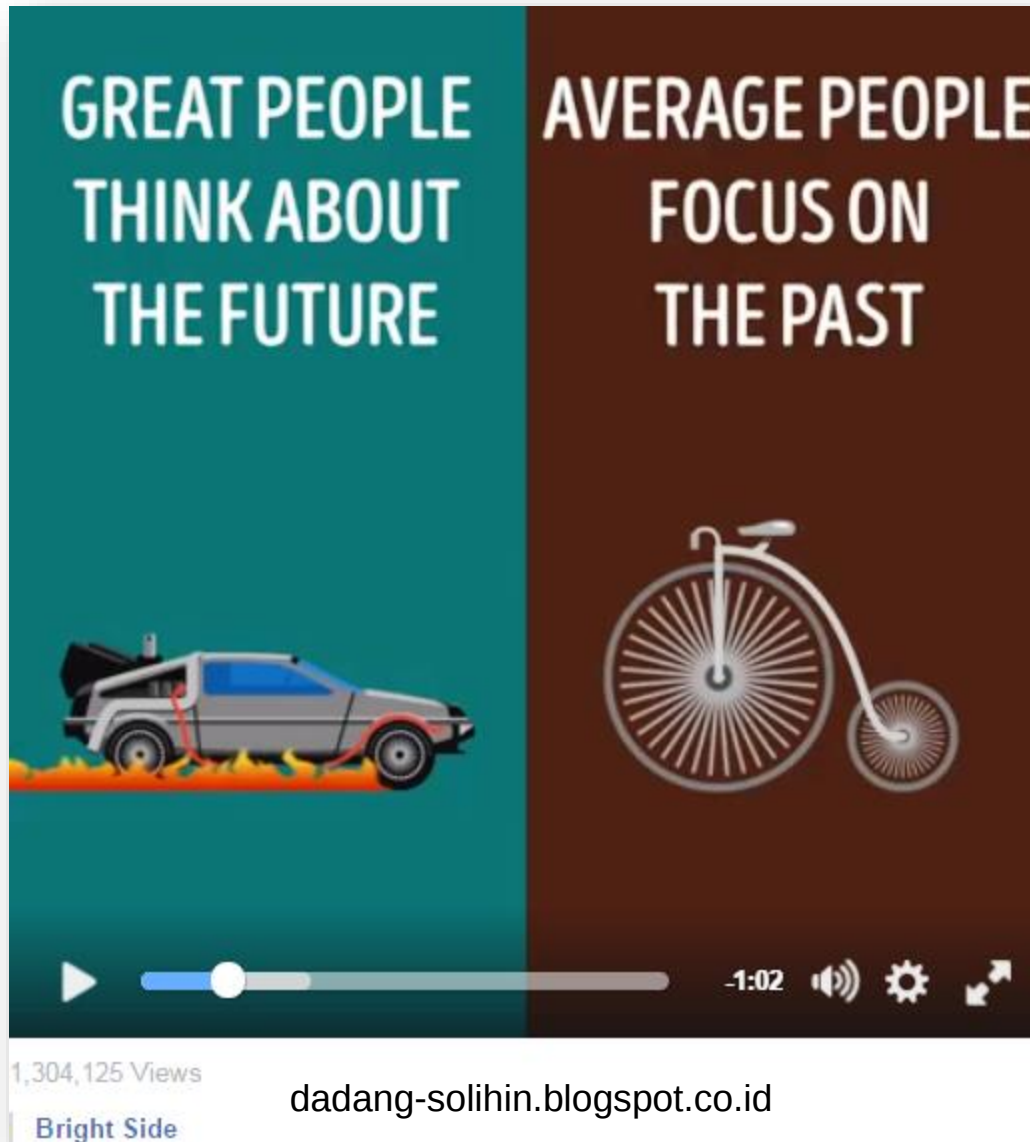
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Visionary Planning

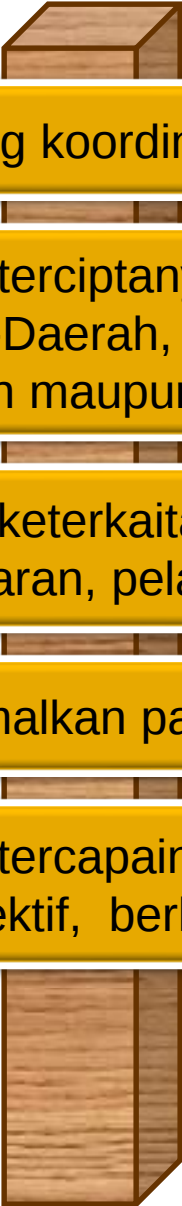


Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN

- 
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Status Hukum Dokumen Perencanaan

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional UU17/2007 tentang RPJPN





UUD 45 (VISI MISI ABADI)

VISI

Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

MISI

- Melindungi Segenap Bangsa Indonesia
- Memajukan Kesejahteraan Umum
- Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
- Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia berdasarkan Kemerdekaan



RPJPN (Visi Misi Interim, 2005-2025)

RPJMN
2004-2009

RPJMN
2010-2014

RPJMN
2015-2019

RPJMN
2020-2024

dst...

RKP
2009

RKP
2014

RKP
2019

RKP
2024



VISI INDONESIA 2025

"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"

Mandiri

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Adil

Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.

Makmur

Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup.



MISI PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional



VISI INDONESIA 2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL



TAHAPAN PEMBANGUNAN



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Peraturan Presiden No 2/2015



Struktur RPJMN 2015-2019

VISI:

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong

7 MISI

NAWACITA

9 Agenda Prioritas

TRISAKTI

**Berdaulat dalam
Bidang Politik**

- 12 Program Aksi
- 115 Prioritas Utama

**Berdikari dalam
Bidang Ekonomi**

- 16 Program Aksi

**Berkepribadian dalam
Bidang Kebudayaan**

- 3 Program Aksi

Misi Pembangunan

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

9 Agenda Prioritas - NAWACITA

1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Menuju Indonesia yang Jauh Lebih Baik

1. Mengejar peningkatan daya saing,
2. Meningkatkan kualitas manusia termasuk melalui pembangunan mental,
3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan,
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas,
5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah,
6. Memulihkan kerusakan lingkungan,
7. Memajukan kehidupan bermasyarakat.



Strategi Pembangunan Nasional

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

- 1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
- 2) Upaya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar;
- 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
- 4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Pendidikan

Kesehatan

Perumahan

Mental / Karakter

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan Industri

DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN

Antarkelompok
Pendapatan

Antarwilayah:

- (1) Desa,
- (2) Pinggiran,
- (3) Luar Jawa,
- (4) Kawasan Timur

KONDISI PERLU

Kepastian dan
Penegakan Hukum

Keamanan dan
Ketertiban

Politik & Demokrasi

Tata Kelola & RB

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Dimensi Pembangunan

- Koordinasi Perencanaan Multi-Sektor dan Multi K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan Pangan
 2. Kedaulatan Energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi Mental
 7. Kawasan Perbatasan.





Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019



Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Tema Besar Pembangunan Wilayah Kalimantan

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia,
 - Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi;
 - Mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan
 - Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara,
 - Pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Tujuan Strategis

- Tujuan strategis pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:
 1. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa,
 2. Penyediaan infrastruktur wilayah,
 3. Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Sasaran

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	5.9	6.0	6.2	7.2	7.9
Kalimantan Tengah	6.1	7.0	7.5	8.2	8.7
Kalimantan Selatan	5.0	6.2	6.8	7.6	8.6
Kalimantan Timur	4.5	5.6	5.6	6.4	7.0
Kalimantan Utara	5.0	5.0	6.0	6.4	6.9

Sasaran

Tingkat Kemiskinan Wilayah

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	8.7	8.0	7.4	6.8	6.1
Kalimantan Tengah	6.0	5.8	5.3	4.8	4.3
Kalimantan Selatan	4.5	4.2	3.8	3.5	3.2
Kalimantan Timur	5.1	4.7	4.3	3.9	3.5
Kalimantan Utara	6.7	6.2	5.7	5.1	4.6

Sasaran

Tingkat Pengangguran Wilayah

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Barat	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Tengah	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
Kalimantan Selatan	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4
Kalimantan Timur	8.4	8.0	7.6	7.2	6.9
Kalimantan Utara	7.9	7.6	7.2	6.6	6.3

Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

**Kegiatan Strategis Jangka Menengah
Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan**



Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pembangunan KA Tanjung-Paringin- Rantau-Martapura-Bandara Syamsoedin Noor - Banjarmasin 2. Pembangunan jalur kereta api : Banjarmasin Pelaihari Batu Licin Sengayam Tanah Grogot 3. Pembangunan Jalur KA Tanjung-Balikpapan 4. Pembangunan Jalur KA Banjarmasin-Palangkaraya		

Perhubungan Darat

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Banjarmasin*		

Perhubungan Udara

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pengembangan Bandara Gusti Syamsir Alam 2. Pengembangan Bandara Syamsudian Noor Banjarmasin		

Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pengembangan Pelabuhan Laut Batulicin		
2. Pembangunan Pelabuhan Seibuku (sebuku)		
3. Pengembangan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan		
4. Pengembangan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin*		
5. Pengembangan Pelabuhan Marabatuan		

Jalan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pembangunan Jalan akses Kawasan Industri Batulicin ke Pelabuhan Batulicin 2. Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut 3. Pembangunan Jalan Benua Anyar - Margasari-Ma. Muning-Kandangan 4. Pembangunan Jalan Kandangan - Hampang- Batu Licin 5. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Batulicin Ruas Batulicin-Lumpangi, Batulicin-Mentewe, Batulicin-Pagatan, Batulicin-S.Kupang, dan Simp. Kodeco-Mentewe 6. Pembangunan Jalan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Trisakti - Pasir Mas - Jembatan Barito) 7. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti dan Pelabuhan Pelaihari 8. Peningkatan Jalan Ambungan - Tajau Pecah 9. Pembangunan Jalan Lingkar (Sei Ulin dan Batu Licin) 10. Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut		

ASDP

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Sebuku*		

Ketenagalistrikan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. PLTGU/MGU Kalsel Peaker 1 200 MW 2. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Seberang Barito) 100 MW 3. PLTG/MG Mobile PP Kalselteng (Trisakti dan Kayutangi) 100 MW 4. PLTU Kalsel (FTP2) 2x100 MW 5. PLTU Kalselteng 2 100 MW 6. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi 7. Pembangunan PLTS Komunal 8. Program Listrik Gratis		

Telekomunikasi dan Informatika

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Lanjutan Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Batang Alai		
2. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Barito di Marabahan, Kab Batola		
3. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Martapura, Kota Banjarmasin		
4. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi Sungai Martapura, Kab Banjar		
5. Pembangunan Pengendali Erosi dan Proteksi S. Tabalong (3 Lokasi)		
6. Pengendalian Banjir Santui, Kintap dan Batu Licin		
7. Pengendalian Banjir, Jorong, Asam - Asam & Kintap		
8. Pengendalian Banjir Kandang Jaya		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
9. Normalisasi Sungai Martapura 10. Pembangunan Pengaman Pantai Aluh Aluh 11. Pembangunan Waduk Tapin 12. Tanah Bendungan Tapin 13. Pembangunan Embung Tala 14. Pembangunan Embung Tanbu 15. Pembangunan Air Baku Banjar Bakula		

Pendidikan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pembangunan sekolah baru SD, SMP, SMA/SMK 2. Pembangunan ruang kelas baru SD, SMP, SMA/SMK. 3. Rehabilitasi ruang kelas SD, SMP, SMA/SMK. 4. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru (S1) 5. Pendidikan keaksaraan dan pendidikan paket A, paket B, dan paket C		

Kesehatan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. Pembangunan Puskesmas yang terakreditasi (1 kecamatan = 1 puskesmas) 2. Peningkatan sarana prasarana kesehatan 3. Bina gizi kesehatan ibu dan anak 4. Penyehatan lingkungan 5. BOK		

Perumahan

RPJMN	RPJMD Kalsel	RPJMD Kab Banjar
1. SPAM Regional Banjarbakula 2. Rusunawa Kab Banjar 4TB, Kab Kotabaru 1TB, Banjarmasin 2TB, Hulu Sungai Utara 1 TB 3. Penanganan Kawasan kumuh di Banjarmasin, Kab Barito Kuala, Kotabaru, dan Kab Banjar		

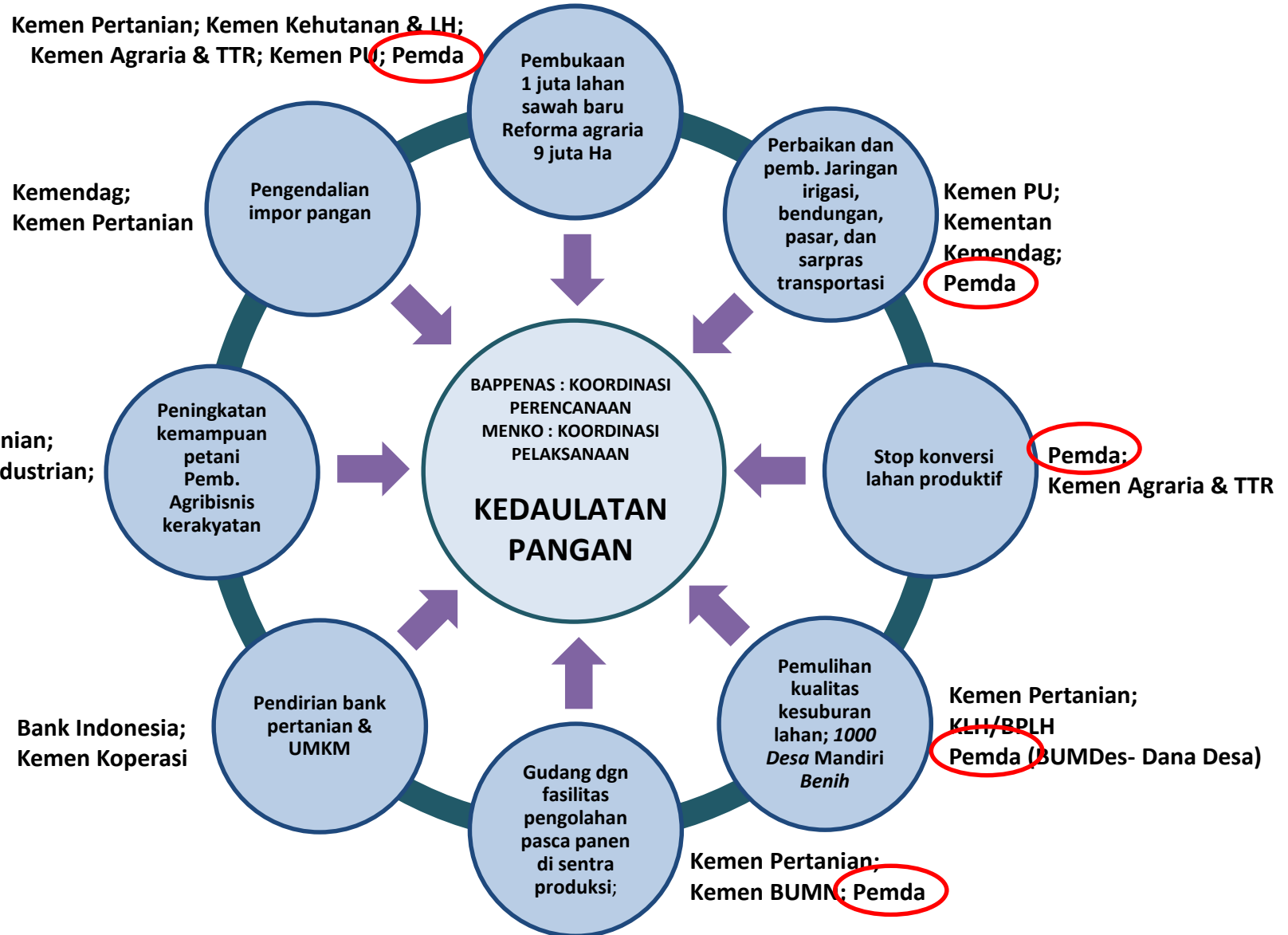
Multilateral Meeting

Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

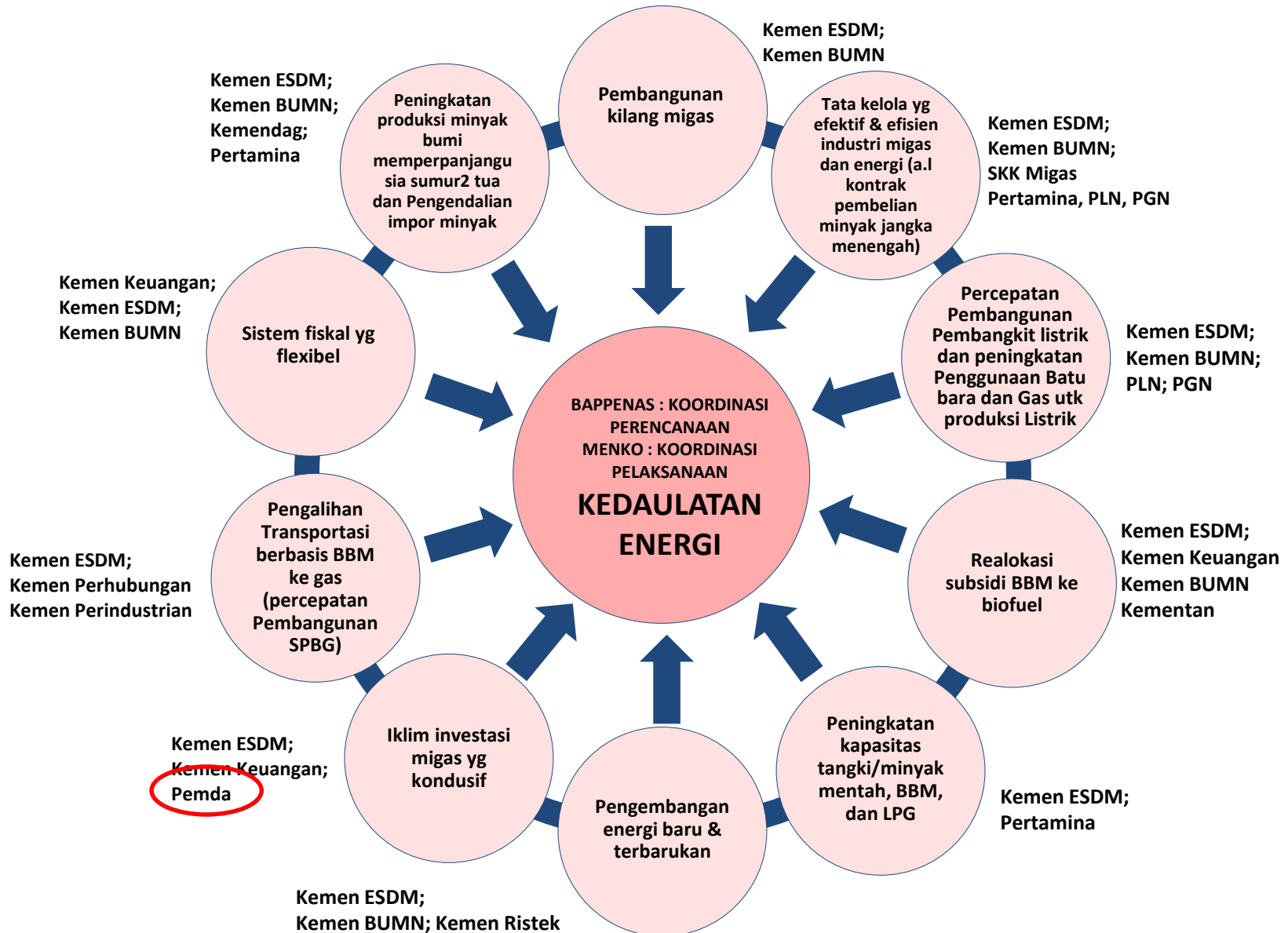
- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



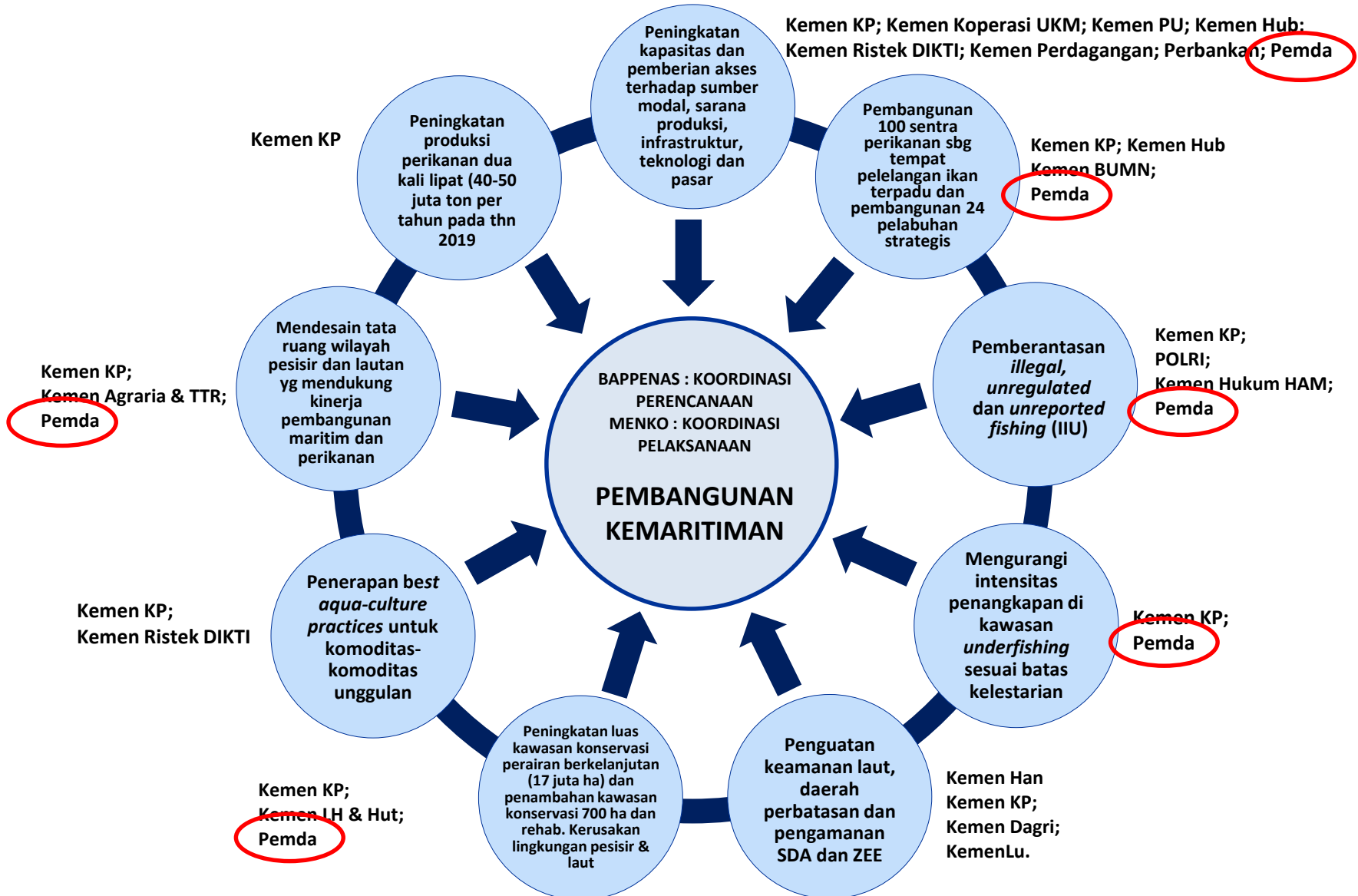
1. Kedaulatan Pangan



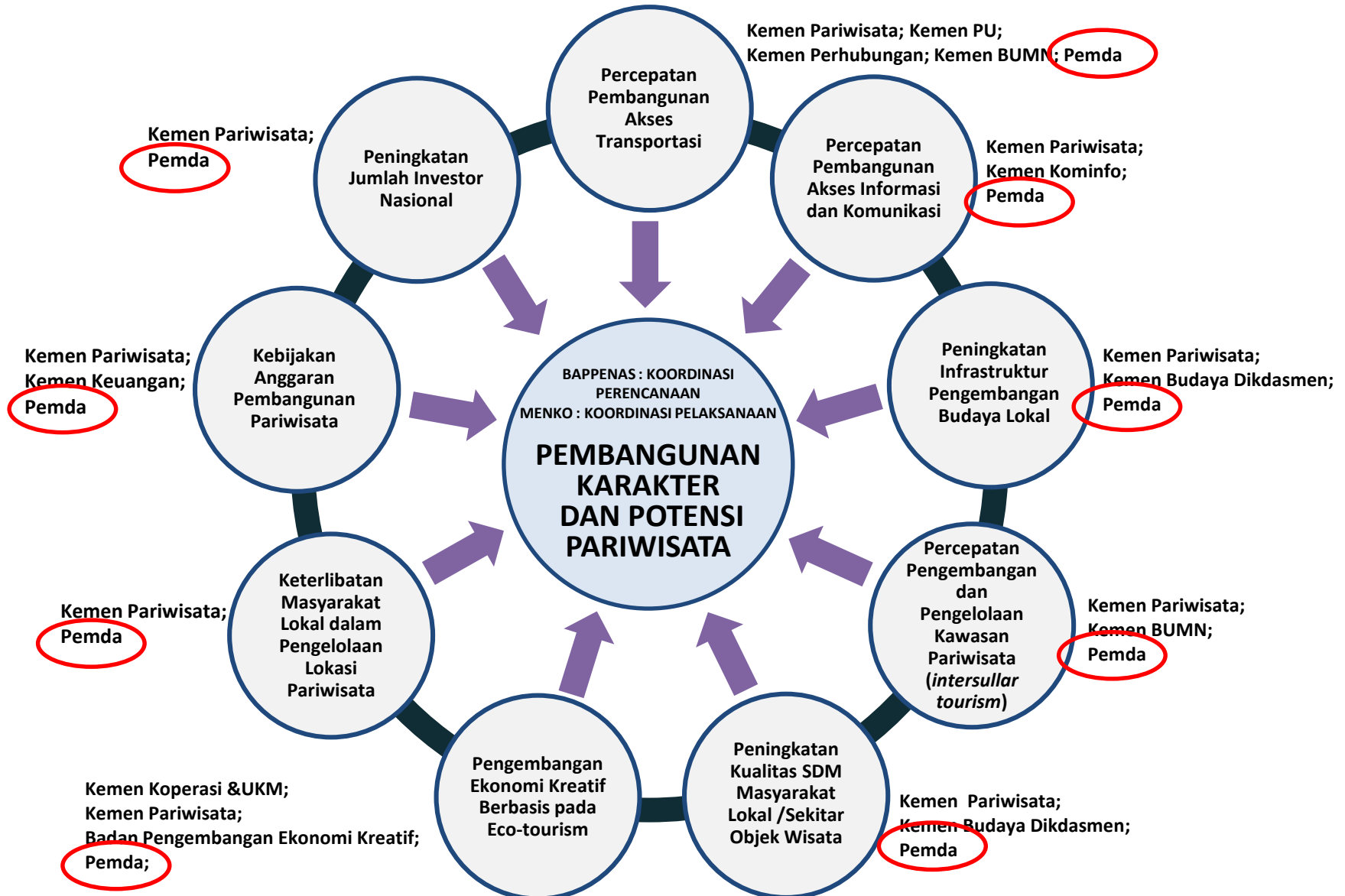
2. Kedaulatan Energi



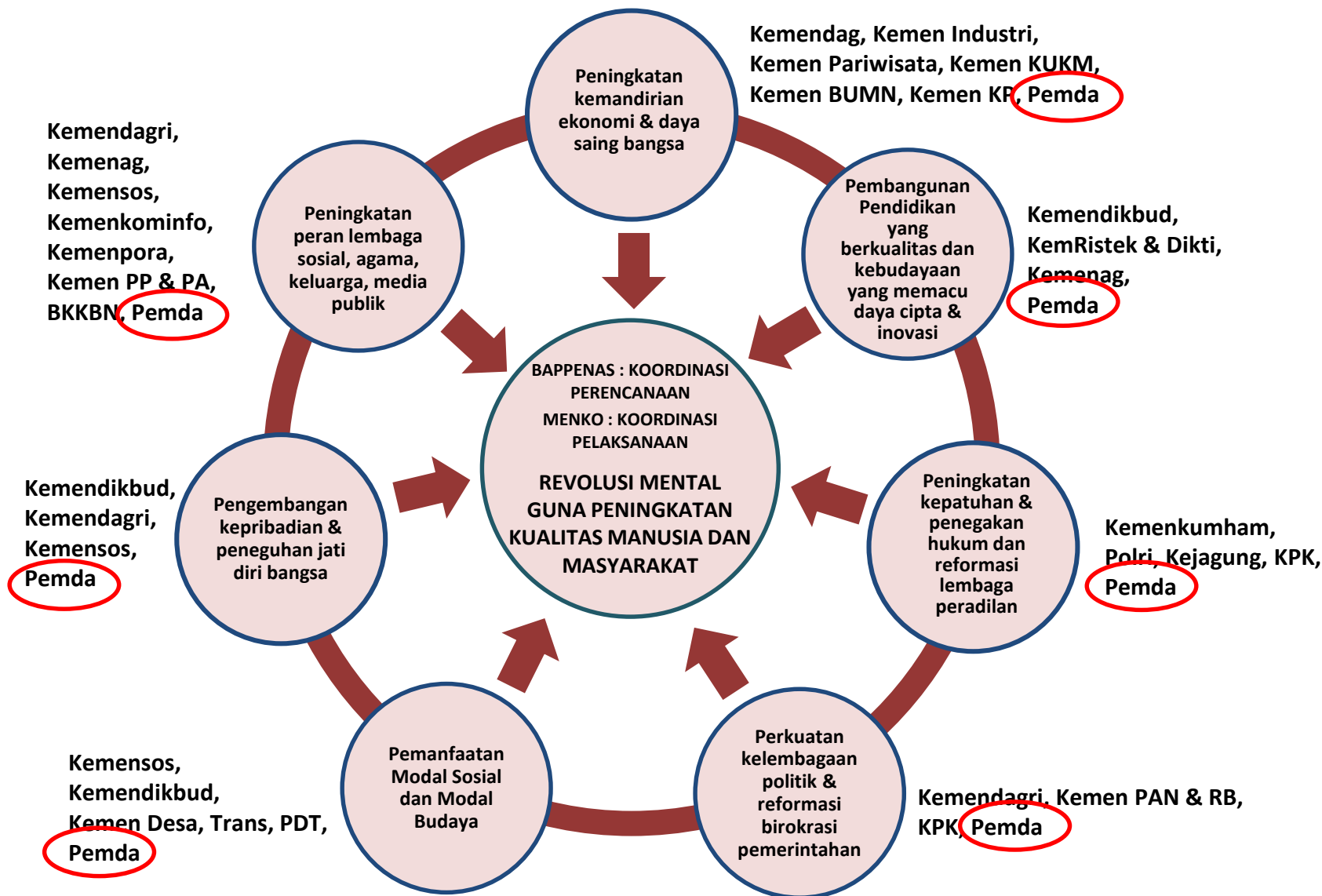
3. Kemaritiman



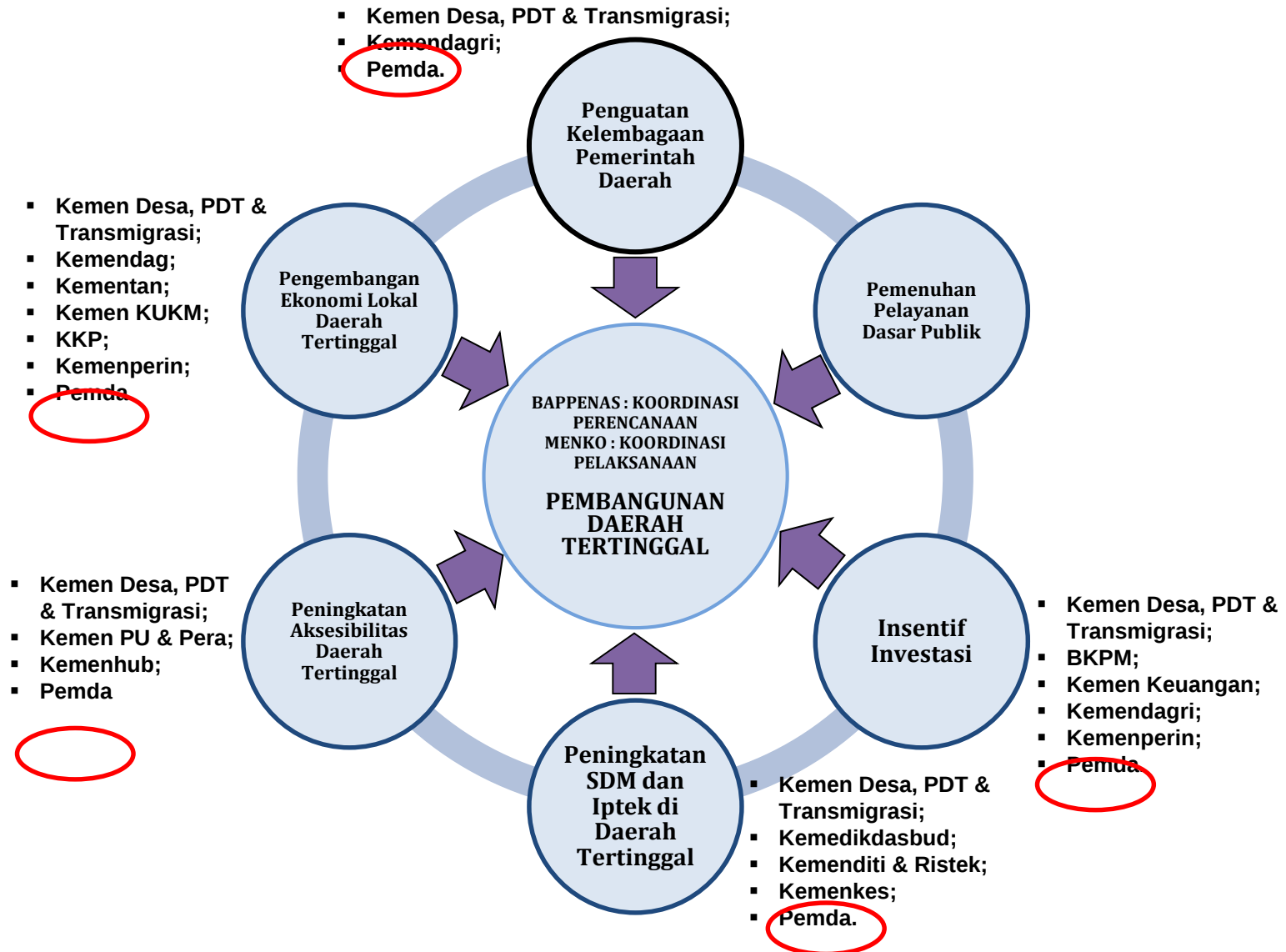
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



Pembangunan Daerah Tertinggal





Terima Kasih